



PAPER – OPEN ACCESS

Penguatan Resiliensi dan Strategi Penghidupan Masyarakat Rawan Bencana

Author : Dewi Cahyani Puspitasari, dkk
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.592
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Penguatan Resiliensi dan Strategi Penghidupan Masyarakat Rawan Bencana

Community Survival and Adaptation in the Mount Sinabung Disaster Risk Area Karo District

Dewi Cahyani Puspitasari^a, Mei Nurul Aini^b, Rina Satriani^c

^{a,b,c} Departemen Sosiologi, Fakultas ISIPOL, Universitas Gadjah Mada

Email : dewi.cp@ugm.ac.id; mei.nurul.a@mail.ugm.ac.id; rinasatriani@mail.ugm.ac.id

Abstract

Disaster risk reduction mainstreaming in Indonesia is rising parallel with the condition of natural, unnatural, and social disaster. Besides, there is awareness of disaster as threat or hazards for sustainability development and in achieving some targets of Sustainable Development Goals (SDGs). So far, government cooperates with stakeholders from domestic and international level combined various strategy and program of disaster risk reduction to solve the problem as part of development process. One of the concept is resiliency improvement to minimize social and economic vulnerability which can affect to the welfare and livelihood of community. This research is focuses based on with study case of the risk of landslide. The goals of this research are first, to identify livelihood characteristic and economic resiliency of community in area of landslide threat; second, to identify the capacity of community in economic resiliency; and third, to identify adaptive strategy of community in economic resiliency. This research analyzed a case study as part of research method in Jelok Village, Purworejo, Central Java. The results showed that majority of Jelok community works as farmer in hillside of this village. They have skills to process plantation and agricultural product with sale value. Thus, the community also has capacity to and adaptive strategy in building social networking with stakeholders in relation with community livelihood. Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Purworejo facilitated some trainings for the community such as strengthening the function of disaster risk reduction forum and or village-owned business entity (BUMDES) as medium of economic resiliency improvement of community.

Keyword: Capacity, Risk, Resiliensi, Strategy, Livelihood;

Abstrak

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Indonesia kian meningkat seiring dengan kondisi bencana alam, non-alam maupun sosial. Selain itu juga adanya kesadaran bahwa bencana merupakan ancaman bagi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian sejumlah target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Pemerintah bekerjasama dengan multipihak baik daerah, nasional dan global dengan memadukan beragam strategi dan program pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari proses pembangunan. Salah satu konsennya adalah meningkatkan resiliensi masyarakat untuk meminimalisir kerentanan ekonomi dan sosial yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan penghidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus dari penelitian ini dengan mengambil contoh kasus pada lokasi rawan bencana tanah longsor. Tujuan penelitian adalah *Pertama*, mengidentifikasi karakteristik penghidupan dan resiliensi ekonomi masyarakat di wilayah yang memiliki ancaman bencana tanah longsor; *Kedua*, mengidentifikasi kapasitas masyarakat dalam upaya resiliensi ekonomi dan *Ketiga*, mengidentifikasi strategi adaptif masyarakat dalam upaya resiliensi ekonomi.

Metode penelitian adalah studi kasus pada lokasi rawan bencana tanah longsor di di Desa Jelok, Purworejo, Jawa Tengah. Analisis menggunakan teori resiliensi, strategi penghidupan dan kapasitas komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jelok mayoritas bermatapencaharian sebagai pekebun dengan lahan di lereng-lereng perbukitan. Mereka memiliki memiliki keterampilan dalam pengolahan lahan perkebunan dengan menanam tanaman produktif dan bernilai jual. Selain itu, masyarakat memiliki kapasitas dan strategi adaptif dengan membangun jejaring sosial dengan multipihak kaitannya dengan sumber nafkah (*livelihood*) masyarakat. Adanya fasilitasi berupa pelatihan dari BPBD Purworejo, penguatan fungsi forum PRB maupun kelembagaan BUMDES menjadi sarana penguatan resiliensi ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Kapasitas, Risiko Resiliensi, Strategi, Penghidupan;

1. Pendahuluan

Pemerintah mengartikan bencana sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

^a Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta

^b Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta

^c Peneliti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, DI Yogyakarta

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan tekanan batin. Dengan demikian, bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Faktanya saat ini terjadi peningkatan frekuensi bencana yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban. Setiap peristiwa bencana selalu memberikan penderitaan bagi para korban yang berada di wilayah bencana. Selain korban jiwa, kerugian material juga tak mungkin terhindarkan. Hal ini tentu berdampak pula terhadap peningkatan kemiskinan di daerah-daerah rawan bencana. Para korban bencana biasanya akan mengalami ketergantungan terhadap bantuan. Alasan waktu dan urgensi menyebabkan aspek-aspek penting lainnya seperti ekosistem dan kelangsungan hidup korban bencana terabaikan. Kondisi tersebut tentu saja sangat tidak baik bagi kelangsungan hidup mereka di kemudian hari.

Menurut Budisusila, setiap bencana dalam pelbagai tingkatan akan mengakibatkan berbagai bentuk kerentanan sosial yang ditandai oleh kurangnya infrastruktur dan kebutuhan pendukung hidup, buruknya kesehatan dan kekurangan gizi, kemiskinan, keterpurukan sosial dan kemerosotan atau kemandekan ekonomi bagi masyarakat [1]. Dalam situasi seperti itu, perilaku masyarakat secara kolektif pun menjadi *disorganized*. Realitas tersebut mencerminkan suatu keadaan masyarakat yang tengah menghadapi proses kaotik (*chaos*). Sementara menurut pendapat Benson, dkk [2] kerentanan terhadap bahaya-bahaya alam dan kemiskinan saling berkaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain. Kondisi bencana dapat menjadi potensi sumber kesulitan kelompok rentan, khususnya yang berada dibawah garis kemiskinan. Bencana dapat menimbulkan kehilangan jiwa, rumah dan aset, mengganggu peluang penghidupan, pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan-pelayanan sosial, menggerogoti tabungan dan menciptakan masalah-masalah kesehatan, seringkali dengan konsekuensi-konsekuensi yang berjangka panjang. Dengan demikian, bencana dapat mengganggu kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengakibatkan sumber-sumber daya keuangan harus dialokasikan untuk upaya-upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan.

Respon banyak pihak terhadap penanggulangan bencana dan rekonstruksi pascabencana juga beragam. Program pembangunan pascabencana lebih fokus pada tindakan tanggap darurat yang seringkali menimbulkan masalah baru. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pasca bencana menjadi penting sebagai bentuk dukungan aktif dari penduduk lokal khususnya para penyintas. Hal ini memungkinkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang secara jangka panjang dapat meningkatkan manfaat sosio-ekonomi masyarakat.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian bencana meliputi *Pertama*, mengidentifikasi karakteristik penghidupan dan resiliensi ekonomi masyarakat di wilayah yang memiliki ancaman bencana tanah longsor; *Kedua*, mengidentifikasi kapasitas masyarakat dalam upaya resiliensi ekonomi dan *Ketiga*, mengidentifikasi strategi adaptif masyarakat dalam upaya resiliensi ekonomi. Peneliti melakukan studi kasus pada salah satu lokasi penelitian bencana tanah longsor dan tanah bergerak di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Kejadian bencana tanah bergerak pada tahun 2017 berimplikasi pada ketiadaan tempat tinggal (hunian) milik sendiri yaitu sejumlah 26 (dua puluh enam) Kepala Keluarga (KK). Mereka ini pada akhirnya kembali ke tempat tinggal masing-masing meskipun kondisi lingkungan fisik (tanah bergerak) masih rawan. Selain itu dari 26 (dua puluh enam) KK tersebut, sejumlah 4 (empat) KK masih tinggal di hunian sementara karena kondisi rumah (tempat tinggal) hilang saat kejadian.

2. Kerangka Konseptual

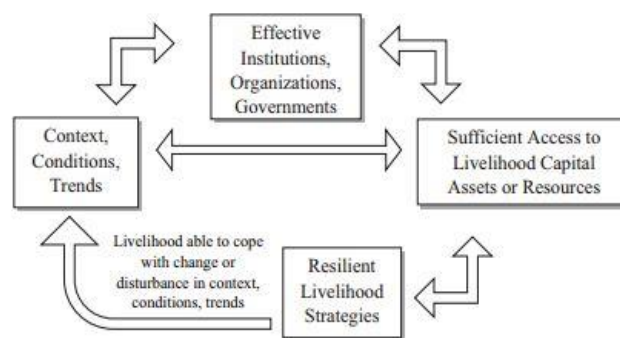
Konsep resiliensi berasal dari Bahasa latin 'resilio' yang berarti 'kembali ke semula' dan dalam konteks sosial, resiliensi merujuk pada kemampuan untuk dapat bertahan dalam keadaan yang kacau [3]. Konsep resiliensi pada awalnya merupakan adaptasi dari disiplin ilmu Psikologi dan Psikiatri pada tahun 1940-an yang menggarisbawahi bahwa manusia memiliki kemampuan untuk dapat merespon dan mampu bertahan dalam situasi yang tidak diinginkan atau berada di luar kendali (Waller, 2001; Johnson dan Wiechelt, 2004). Sejauh ini, konsep resiliensi telah diaplikasikan dalam beberapa disiplin ilmu, khususnya kajian mengenai kebencanaan. Hal ini dikarenakan konsep resiliensi dapat digunakan dalam memahami manajemen kebencanaan dan bagaimana upaya pemerintah untuk meminimalisir resiko dari bencana. Dalam studi kebencanaan, resiliensi tidak hanya berarti pada sekadar memberikan bantuan pada korban, tetapi juga bagaimana kapasitas dan kemampuan mereka dalam menghadapi bencana. Melalui konsep resiliensi, kerentanan dan resiko dari bencana dapat ditransformasikan menjadi sebuah kerangka kerja yang secara strategis dapat memetakan kemampuan masyarakat yang terdampak dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Lebih lanjut Greiving dan Ubaura [4] menjelaskan bahwa resiliensi merupakan cara untuk bertahan terhadap ketidakpastian karena kondisi mendatang yang sulit diprediksi serta kemungkinan akan kerentanan yang ada dalam masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan ini, UNISDR [5] menjelaskan bahwa resiliensi merupakan kemampuan suatu sistem atau masyarakat

yang terdampak ancaman bahaya bencana untuk mampu bertahan, mengakomodasi, dan pulih kembali dalam waktu yang tidak lama dan efisien, termasuk kemampuan untuk memelihara kembali situasi yang normal. Walker juga berpendapat bahwa resiliensi merupakan cara berpikir dalam memahami permasalahan yang muncul dan bagaimana mencari solusi untuk mengatasi masalah kebencanaan [6].

Analisis penghidupan berkelanjutan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan tiga aspek pokok kerentanan penghidupan terhadap guncangan dan tekanan. Menurut Benson, dkk [2] bencana dapat menimbulkan dampak pada semua jenis aset/modal penghidupan yang berbeda yaitu modal alam (misal, banjir dapat merusak lahan pertanian), modal fisik (misal, hilangnya tempat tinggal, peralatan rumah tangga), modal finansial (misal, hilangnya simpanan uang), modal manusia (misal, hilangnya nyawa manusia, cedera, pengangguran) dan modal sosial (misal, rusaknya jejaring sosial). Oleh karena itu, analisis strategi penghidupan yang diadopsi oleh keluarga dan masyarakat dapat membantu meminimalisir kerentanan yang akan muncul pascabencana. Lembaga, kebijakan dan proses analisis penghidupan berkelanjutan dapat membantu melindungi warganya terhadap dampak guncangan (bukan hanya langkah-langkah mitigasi bencana yang konvensional, misalnya, pendidikan publik tentang penghindaran risiko, rencana evakuasi dan pengadaan bantuan, tetapi juga semua jenis intervensi pembangunan yang membangun aset penghidupan, seperti kredit kecil, asuransi, kesehatan, perluasan pertanian dan proyek pembangunan kelembagaan).

Seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi pra dan pasca bencana, Tanner [7] mengembangkan konsep livelihood resilience atau ketangguhan dalam penghidupan yang didefinisikan sebagai kapasitas antar generasi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesempatan penghidupan yang lebih baik terlepas dari kekacauan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Konsep ini mengedepankan peran manusia dalam mengatasi permasalahan yang muncul sebelum dan setelah kejadian bencana. Berikut ilustrasi gambar mengenai cara membangun Resiliensi Penghidupan:



Gambar 1. Cara Membangun Livelihood Resilience

Sumber: Quandt, Amy. 2018. Measuring Livelihood: The Household Livelihood Resilience Approach (HLRA). *World Development* 107 (2018) 253-263

Tinjauan kapasitas masyarakat menurut Chaskin [8] bergerak melalui beberapa kombinasi dari tiga tingkat interaksi sosial meliputi individu, organisasi dan jaringan asosiasi. Tingkat individu yang dimaksud adalah keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya penduduk individu dalam masyarakat. Kemudian, tingkat organisasi berfokus pada organisasi perkumpulan lainnya termasuk organisasi berbasis masyarakat. Terakhir, jaringan asosiasi tercermin dalam kemampuan kolektivitas tersebut untuk melaksanakan fungsi mereka responsif, efektif, dan efisien sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dari aktor dan proses yang mereka terhubung, dalam maupun di luar komunitas. Kapasitas komunitas tersebut memiliki karakteristik meliputi: Pertama, rasa (satu kesatuan) masyarakat berupa tingkat keterhubungan antara anggota dan pengakuan mutualitas keadaan. Salah satu komponen dari rasa masyarakat adalah adanya nilai kolektif yang dipegang, norma, dan visi termasuk rasa percaya, kepemilikan dan kebersamaan diakui serta dimensi kognitif (termasuk cara-cara di mana anggota masyarakat menganggap makna pada keanggotaan mereka dalam kelompok). Kedua, tingkat komitmen di antara anggota masyarakat sebagai bagian dari individu-individu tertentu, kelompok atau organisasi yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat dan yang menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya lainnya untuk menjadi lebih baik.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berasal dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang dipilih (purposive) sehingga dapat memberikan informasi dan data relevan dengan penelitian. Jenis data wawancara yang dikumpulkan bertujuan untuk mengidentifikasi profil keluarga penyintas, karakteristik pemanfaatan livelihood

assets dari masyarakat Desa Jelok, proses perubahan strategi nafkah keluarga penyintas. Selain itu dilakukan observasi secara langsung meliputi tempat atau lokasi rentan bencana di Desa Jelok, orang dan komunitas serta aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian dalam keadaan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi. Peneliti juga memanfaatkan beragam literatur secara integratif dan teoretis yang menurut Cooper (dalam Creswell [9]) yaitu menyimpulkan tema-tema umum dalam literatur serta fokus pada teori-teori dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Gambaran tentang profil informan kunci sebagai berikut: Pertama, Informan pertama WY, beliau berusia 21 tahun. Statusnya adalah sebagai penyintas. Ia tinggal di Dusun Ngesong bersama suami dan 2 anaknya. Ia adalah seorang pedagang warung sembako. Ketika terjadi bencana tahun 2016 warung miliknya ikut terbawa arus longsor. Untuk melanjutkan kehidupannya sekarang ini beliau kembali membangun warung dan berjualan sembako seperti sedia kala. Kedua, Informan kedua adalah ST, usianya 35 tahun dan merupakan seorang penyintas. Beliau bekerja sebagai buruh pabrik sejak tahun 2007. Ketika terjadi bencana beliau langsung mengambil cuti kerja hingga beberapa bulan setelahnya. Itu karena rumah tinggalnya ikut terbawa arus longsor sehingga beliau kebingungan memikirkan harus tinggal di mana, baru setelah mendapatkan kontrakan rumah beliau mulai kerja kembali. Saat ini beliau menempati rumah relokasi di Dusun Krajan II bersama suami dan seorang anaknya. Ketiga, Informan ketiga adalah IM. Ia berusia 33 tahun dan bertempat tinggal di Dusun Krajan II. Beliau merupakan tokoh masyarakat Desa Jelok. Keempat, Informan keempat adalah PB. Beliau memulai tugas sebagai kepala Kecamatan Kaligesing sejak Oktober 2016 dan berperan aktif dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi alam dan Kelima, Informan kelima adalah TN, berusia 28 tahun dan menjabat sebagai ketua Pokmas Tani Lebah Klanceng yang beranggotakan 15 orang dengan kisaran umur 25-40 tahun.

Teknik analisis data dilakukan sesuai prosedur analisis data kualitatif. Menurut Creswell [9] dalam analisis data kualitatif dapat melibatkan pengumpulan data yang terbuka yaitu berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Dalam hal ini tim peneliti melakukan analisis pada data kualitatif berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen diolah secara deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menggolongkan dan mengeliminasi data-data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan setelah mengolah data kualitatif gabungan dan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel dan gambar.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Karakteristik Penghidupan dan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Jelok

Secara administratif Desa Jelok terletak di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Akses jalan menuju Desa Jelok ini sudah baik, yaitu berupa jalan aspal dan jalan rabat beton. Wilayah Desa Jelok terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun, 2 (dua) dusun diantaranya memiliki potensi ancaman bencana. Dusun tersebut yaitu Dusun Ngesong dan Dusun Sibatur. Desa Jelok ini berada di daerah pegunungan dan di beberapa titik penyusun tanahnya mulai mengalami kerapuhan. Sementara itu bencana yang telah terjadi pada tahun 2016 memberi pengalaman tersendiri bagi masyarakat Desa Jelok.

Dari sisi penghidupan, sebagian besar masyarakat Jelok bekerja sebagai petani/pekebun karena wilayahnya berpotensi untuk ditanami produk-produk perkebunan. Hasil panennya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu terdapat sedikit warga yang bekerja di sektor formal seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil). Mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi ada pula beberapa yang menganut agama Kristen maupun Katholik. Aspek kekeluargaan dalam masyarakat masih sangat kental dimiliki oleh masyarakat Jelok, misalnya adanya budaya "rewang" yaitu memberi bantuan berupa tenaga atau pun materi ketika salah satu yr dari mereka memiliki hajatan. Selain itu juga rutin mengadakan pengajian dalam rangka selamatan desa (merti desa) di Bulan Rajab. Pengalaman bencana tanah longsor tahun 2016 yang terjadi di Desa Jelok mengakibatkan 10 (sepuluh) korban meninggal dunia telah memberikan dampak perubahan terhadap karakteristik penghidupan para penyintas.

Karakteristik kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Jelok pada umumnya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang subur, sistem pengairan yang baik, dan tersedianya lahan-lahan pertanian dan perkebunan di sekitar pemukiman warga. Berikut gambaran mengenai modal sumber daya alam (SDA) Desa Jelok:

Tabel 1. Modal Sumber Daya Alam (SDA) Desa Jelok

INDIKATOR MODAL SDA	KETERANGAN
Kepemilikan Tanah	Milik sendiri
Sumber Daya Air	Milik masing-masing, (ke depan ada rencana pembangunan saluran air).
Sumber Daya Hutan	Pohon Jati, sonokeling, albasia, mahoni, sengon, buah durian, manggis, dan rambutan.
Visi Masyarakat	Mengolah dan merawat sendiri.

Sumber: Olah data penelitian, 2019.

Mayoritas masyarakat Jelok memiliki tanah sendiri yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk perkebunan. Lahan tersebut biasanya ditanami dengan pohon jati, sonokeling, albasia, mahoni, dan sengon yang dapat dimanfaatkan kayunya. Selain itu terdapat warga yang menanam pohon durian, manggis, dan rambutan yang dapat dimanfaatkan buahnya. Masyarakat mengolah dan merawat lahan tersebut secara pribadi atau dengan mempekerjakan orang lain. Sementara itu akses sumber daya air masih kepemilikan masing-masing, tetapi sekarang ini akan dibangun saluran air yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Bila ditinjau dari modal fisik yaitu perumahan, secara umum warga memiliki rumah yang terdiri dari atap, tembok, dan lantai dengan sanitasi yang ada di setiap rumah warga. Meskipun demikian lantainya belum semua kedap air, artinya terdapat beberapa bagian dari rumah yang masih beralas tanah, misal pada bagian dapur. Untuk sarana air bersih, masyarakat Desa Jelok mendapatkan akses air bersih yang bersumber dari sumur yang di berada di dekat-dekat rumah mereka, air tadah hujan, dan sungai yang berada di sepanjang Desa Jelok pada bagian bawah. Untuk sarana pendidikan terdapat PAUD, TK (Taman Kanak Kanak), dan SD (Sekolah Dasar). Sementara itu untuk jenjang SMP dan SMA/SMK berada di kota. Sarana peribadatan, fasilitas kesehatan serta sarana perbelanjaan juga tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu terdapat bank sampah yang menjadi salah satu program yang dikelola oleh BUMDES Jame Mule. Desa juga memiliki alat produksi pembuatan gula semut sebagai hasil investasi alat dari kegiatan pelatihan tahun 2017.

Untuk modal sumber daya manusia (SDM) mayoritas penduduk Desa Jelok termasuk dalam usia produktif (rentang usia 31-60 tahun) dengan tingkat pendidikan paling banyak yaitu tamatan Sekolah Dasar (SD). Mata pencahariannya didominasi oleh Petani/pekebun dan buruh, sementara yang bekerja sebagai PNS, guru, karyawan swasta hanya beberapa saja. Adanya modal SDM ini juga berkaitan dengan modal ekonomi warga yang besaran pendapatannya sesuai dengan jenis pekerjaan/profesi mereka. Secara umum warga telah melakukan saving, melakukan pembagian kerja, memiliki akses ke lembaga/organisasi keuangan serta memiliki asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Selanjutnya, modal sosial dapat ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2. Modal Sosial Desa Jelok

INDIKATOR MODAL SOSIAL	KETERANGAN
Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Saling bekerja sama
Hubungan sosial kemasyarakatan: mengambil keputusan, mengatasi konflik	Dengan musyawarah untuk mencapai mufakat
Fasilitas Jasa Sosial	Iuran kematian, sumbangan hajatan
Hubungan dengan pihak luar	Pemerintah dan Swasta

Sumber: Olah data penelitian, 2019.

Meskipun belum memiliki bangunan fisik lumbung desa, sesama warga desa saling membantu dalam kebutuhan pokok saudara atau kerabat lainnya, misalnya "nyempil" beras, artinya membeli besar hasil panen. Ada pula iuran kematian maupun sumbangan untuk hajatan kepada masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu dalam hubungan sosial kemasyarakatan misalnya untuk mengambil keputusan dan mengatasi konflik, masyarakat memilih jalur musyawarah untuk mencapai mufakat.

4.2. Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Resiliensi Ekonomi

Sebelum kejadian bencana tanah longsor pada tahun 2016, Desa Jelok belum memiliki pemahaman mengenai pentingnya peran lembaga atau institusi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi desa. Pada umumnya jika ada permasalahan yang muncul, penyelesaian masalah masih diselesaikan pada level musyawarah tanpa adanya organisasi masyarakat yang menaungi aspirasi masyarakat desa. Situasi ini kemudian berubah setelah kejadian bencana dimana masyarakat Desa Jelok menyadari bahwa adanya organisasi ditengah-tengah masyarakat akan membantu pemulihan kondisi setelah bencana dengan lebih baik. Selain itu melalui adanya organisasi masyarakat, proses manajemen penyelesaian masalah lebih mudah dilakukan. Ini dikarenakan adanya medium interaksi warga antar warga dan warga dengan pemerintah.

Organisasi yang terbentuk pascabencana di Desa Jelok adalah JEGANA (Jelok Siaga Bencana) yang didirikan oleh tokoh dan penggiat aktivitas masyarakat di Desa Jelok agar kedepannya desa mampu bertahan terhadap kemungkinan yang akan muncul akibat bencana. FPRB JEGANA di dikomando langsung oleh BPBD Kabupaten Purworejo. Pembentukan FPRB JEGANA ini tertuang dalam SK Kepala Desa 360 / BA / VII / 2016. Dengan adanya organisasi JEGANA ini masyarakat diajak untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana, mulai dari situasi pra bencana hingga pasca bencana. Secara tidak langsung adanya organisasi JEGANA ini merupakan bentuk implementasi dari livelihood resilience di bidang human capital. Meningkatkan kapasitas masyarakat ini akan berimplikasi positif dalam pengembangan desa ke depannya, baik dari aspek ekonomi dan sosial. Semakin berkembangnya kemampuan warga Desa Jelok dalam mengelola organisasi JEGANA dan juga dengan adanya UU Desa mengenai pembentukan BUMDES, hal ini kemudian menginspirasi desa untuk membentuk BUMDES dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang telah terlatih. Melalui BUMDES ini masyarakat Desa Jelok memahami bagaimana upaya untuk mampu kembali ke kondisi semula sebelum bencana dalam penghidupan. Berikut ilustrasi tabel tentang kelembagaan lokal Desa:

Tabel 3. Gambaran Peran Kelembagaan Lokal Pascabencana Desa Jelok

Forum PRB (JEGANA)	BUMDES (Jambe Mule)
1. Memfasilitasi warga untuk pelatihan tanggap bencana (aplikasi penggunaan <i>early warning system</i> (EWS) di lokasi tanah bergerak)	1. Pelatihan penguatan kelembagaan/institusi melalui studi banding ke daerah lain.
2. Pelatihan sablon	2. Transfer ilmu pengetahuan pengelolaan unit usaha dengan tim KKN universitas (UGM dan UII) terkait manajemen Bank Sampah.
3. Pelatihan budidaya gula semut (gula kelapa)	3. Pengembangan unit usaha melalui musyawarah desa.
4. Konservasi alam (penanaman pohon Gatep di sepanjang bantaran sungai Desa Jelok.	4. Unit usaha yang dikembangkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Toko material bangunan dengan memanfaatkan pinggir jalan desa sebagai gudang logistik. • Bank Sampah sebagai medium desa untuk pembayaran pajak masyarakat. • Pengelolaan penjualan dan pemasaran madu hasil ternak lebah Klanceng • Pelayanan publik dalam penjualan pulsa, listrik, BPJS, dan sebagainya. • Pelayanan air bersih (masih dalam proses pemasangan infrastruktur).

Sumber: Olah data penelitian, 2019.

Kelembagaan lokal yang muncul pascabencana Desa Jelok selanjutnya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bernama Jambe Mule. BUMDES ini bermitra dengan Kecamatan Kaligesing dan Pemerintahan Desa Jelok. BUMDES ini tepatnya didirikan pada tanggal 2 Mei tahun 2017 sebagai respon pemulihan ekonomi pascabencana dan wujud dari UU Desa yang belum memiliki PAD (Pendapatan Asli Desa). Pembentukan BUMDES tersebut berawal dari musyawarah desa yang dilakukan sebanyak 13 kali pertemuan seperti pernyataan informan berikut:

“Pembentukan BumDes ini melalui musdes sebanyak 13 kali pertemuan. Dana yang dihabiskan untuk pembentukan BumDes ini sebanyak 13 juta. Untuk pekerjaannya ini skala prioritas yang berdasarkan dari hasil musyawarah. Untuk saat ini investor BumDes ini masih 100% dari PemDes jadi keuntungan BumDes ini seluruhnya diberikan ke PemDes kembali.” (IM, 2019).

Pada awal pendiriannya, BUMDES tidak langsung mengalami kesuksesan tetapi juga menghadapi beberapa tantangan, tetapi mereka berhasil menyikapi tantang tersebut hingga akhirnya mampu memperoleh omzet yang tinggi. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Hampir selama delapan bulan kita tidak memiliki anggaran, selama itu kita belajar ke luar untuk pengelolaan BUMDES. Lalu Desember 2017 kita mendapatkan modal dari desa sebanyak 18 juta yang kemudian kita buat bank sampah dan cuci motor dengan omzet bersih pertama pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 245.000 dan untuk satu tahun kemarin kita mendapatkan hasil bersih sebesar Rp. 24.900.000 dengan omzet 450 juta. Itu belum punya kantor, belum punya toko.” (IM, 2019).

Omzet tersebut berhasil diperoleh meskipun belum memiliki bangunan fisik. Berkat adanya kelembagaan BUMDES ini juga membuat Desa Jelok memiliki PAD (Pendapatan Asli Desa). Selain itu juga terdapat kelembagaan informal seperti dasawisma, arisan, dan pengajian secara rutin. Dalam forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai penyampaian atau sosialisasi informasi.

Dari uraian di atas menunjukkan kapasitas masyarakat Desa Jelok tersebut memiliki karakteristik meliputi: Pertama, rasa (satu kesatuan) masyarakat berupa tingkat keterhubungan antara anggota masyarakat untuk bersama-sama mencari pemecahan terhadap masalah sosial warga pascabencana. Mereka memiliki nilai kolektif yang dipegang, norma, dan visi termasuk rasa percaya, kepemilikan, kebersamaan dalam kelompok kelembagaan lokal formal maupun informal. Pada akhirnya, variasi kapasitas tersebut akan berkorelasi terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan analisis kehidupan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihoods/SL) menawarkan perangkat yang mendukung pemaduan bahaya alam dan risiko bencana yang berkaitan ke dalam perencanaan pembangunan. Dengan memberi penekanan pada kerentanan dan guncangan dari luar sebagai hal penting yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat pascabencana serta pelaku kelembagaan lokal yang ada.

4.3. Strategi Adaptif Masyarakat dalam Upaya Resiliensi Ekonomi.

Kondisi pascabencana yang ada di wilayah rentan bencana termasuk di Desa Jelok telah menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan terutama ekonomi. Aktifitas ekonomi masyarakat khususnya bagi keluarga penyintas muncul dengan berbagai strategi nafkah atau mata pencaharian baik di sektor pertanian maupun di luar sektor pertanian. Keluarga penyintas ini melakukan berbagai aktivitas ekonomi serta mencari alternatif sumber nafkah sebagai bentuk upaya dalam menghasilkan pendapatan keluarga. Salah satu hasil penelitian ini adalah keluarga penyintas memiliki beragam pola-pola pencarian nafkah dengan beragam status pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat memenuhi biaya dan kebutuhan rumahtangganya. Berikut gambaran mengenai pilihan strategi dari keluarga penyintas bencana di Desa Jelok:

4.3.1. Penyintas Sopir

Data ini diperoleh dari wawancara informan IM (2019) yang menceritakan pengalaman penyintas lainnya sebagai sopir yaitu: “Ada yang sopir seperti Pak Purwanto dan dokumen resmi kendaraan semuanya hilang. pascabencana dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengurus dokumen tersebut bebas dari biaya dan sudah bisa bekerja seperti biasa kembali. Bahkan ketika di pengungsian, beliau sudah mendapatkan pekerjaan.” (IM, 2019).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya relasi sosial yang baik sehingga memungkinkan masalah penyintas berupa hilangnya dokumen penting miliknya sebagai sopir seperti STNK dan SIM dapat teratasi.

4.3.2. Penyintas Wiraswasta (Dagang)

Terdapat seorang penyintas yang awalnya memiliki warung yang ikut terbawa arus longsor, sehingga ia berusaha bagaimana caranya untuk membangun warung kembali. Berikut pernyataannya:

“Iya, sudah punya warung di sana (lokasi bencana), warungnya dulu ikut hanyut. Setelah tanah longsor buat warung lagi di sini. Waktu itu ada bantuan dari teman-teman saya, dengan ditambah hutang juga. Dari pemerintah juga ada tapi yang ngurus suami saya.” (WY, 2019).

Usahnya mendirikan warung ini tidak lepas dari bantuan dari pihak pemerintah maupun melalui hutang dengan teman maupun kerabatnya. Dengan bantuan-bantuan tersebut, sekarang ini ia telah memiliki warung kembali, dan melanjutkan hidupan seperti sediakala.

4.3.3. Penyintas Paska Pelatihan Usaha

Kondisi pascabencana telah memunculkan beragam fasilitasi pelatihan. Dalam hal ini terdapat pelatihan pembuatan gula semut yang difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Purworejo sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Bahan-bahan yang diperlukan juga banyak tersedia dari dalam desa sendiri sehingga tidak perlu mendatangkan bahan baku dari luar. Berikut kutipan wawancara:

“Karena ada banyak pohon kelapa disini, kita mengadakan pelatihan pembuatan gula semut. Pelatihannya digabungkan dengan orang yang sudah mahir. pembuatan gula semut. Pelatihannya digabungkan dengan orang yang sudah mahir. Namun, sayangnya masyarakat yang terdampak dan yang berpartisipasi tidak begitu merespon dengan baik karena belum terbangun mindset untuk berusaha dibidang ini. Selain itu rata-rata di daerah sini banyak yang jadi petani aren juga.” (IM, 2019).

Selain itu terdapat pelatihan peternak lebah yang diutarakan oleh informan berikut:

“Di sini ada kelompok tani dan hampir seluruh anggotanya ikut, tapi tidak semua mempunyai tempat bertingkat, ada yang kotak biasa. Ada yang masih kita ajari, yang ikut banyak, yang tidak ikut juga banyak.” (IM, 2019).

Kedua pelatihan diatas yang dirasakan manfaatnya oleh warga dan dapat menjadi peluang kerja bagi warga pascabencana. Sementara untuk pelatihan lain seperti sablon tidak berlanjut dikarenakan minimnya respon masyarakat.

Dari temuan penelitian di atas menjadi relevan dengan konsep resiliensi ekonomi dari Tanner [3] bahwa peran manusia menjadi penting dalam mengatasi permasalahan yang muncul sebelum dan setelah kejadian bencana. Secara umum, para penyintas melakukan strategi coping yaitu strategi nafkah untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi karena bencana. Kondisi ini menjadikan penyintas melakukan beragam bentuk respon dan upaya untuk menjawab krisis yang berkaitan dengan sumber nafkah rumah tangga. Selain itu, temuan di atas bila ditinjau dari pendapat Doriza [13] bahwa individu sebagai anggota dari rumah tangga akan memilih secara terbuka di antara berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan. Sementara, rumah tangga menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan untuk berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah. Rumah tangga akan mengejar produktivitas dari setiap sumber daya yang digunakan pada berbagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengejar kepuasan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, karakteristik penghidupan dan resiliensi ekonomi masyarakat di wilayah yang memiliki ancaman bencana tanah longsor secara umum masyarakat penyintas sebagai petani atau pekebun baik dengan kepemilikan lahan sendiri maupun mengolah lahan orang lain (buruh). Bila ditinjau dari sisi modal masyarakat yaitu modal alam terdapat lahan yang ditanami pohon jati, albasia, sengon, tanaman buah serta perkebunan (tanaman kopi dan kelapa). Adanya lahan pertanian berupa sawah meskipun berada diluar Desa Jelok, warga memanfaatkannya untuk memperoleh hasil panen padi. Dari sisi modal ekonomi, secara umum pendapatan warga berasal dari hasil panen (tani) yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga telah terbiasa menabung (saving) baik di lembaga keuangan bank maupun dasawisma. Dari sisi utang-piutang, warga penyintas melakukan utang-piutang pada teman dan kerabat untuk memulai usaha kembali. Kondisi tersebut menjadi modal sosial pascabencana yang semakin menguatkan kerjasama dan guyub-nya antar warga sehingga memudahkan mereka untuk saling tolong menolong. Misalnya, adanya iuran kematian dan sumbangan hajatan yang berlaku bagi semua warga.

Dalam jangka waktu yang tidak lama, masyarakat penyintas mampu melakukan pemulihan pascabencana khususnya dari sisi ekonomi. Misalnya adanya warga yang berprofesi sebagai sopir dan ketika bencana dokumen penting hilang tetapi kondisi tersebut tidak menghambatnya memperoleh pekerjaan baru. Selain itu juga adanya komitmen dari pihak pemerintah lokal untuk membantu memastikan warga yang terdampak mendapatkan fasilitas baik dan memadai sehingga penyintas dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal. Pemerintah Desa Jelok juga melibatkan warga melalui musyawarah seperti saat pembentukan BUMDES.. Untuk modal manusia secara umum warga telah menempuh pendidikan dasar (SD), meskipun terdapat warga yang menempuh pendidikan sampai jenjang sarjana dan pascasarjana (S2). Hal menariknya setelah pascabencana, masyarakat memiliki kecakapan dalam melakukan manajemen bencana yang mereka peroleh dari pelatihan yang di fasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo.

Kedua, kapasitas masyarakat Desa Jelok dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kapasitas individu, organisasi dan jaringan asosiasi. Untuk tingkat individu, masyarakat termasuk penyintas memiliki keterampilan dan pengetahuan berkaitan dengan mitigasi bencana, konservasi alam serta kecakapan berupa sablon dan produk gula semut. Meskipun untuk gula semut tidak berlanjut karena rendahnya respon masyarakat sehingga mereka kembali memproduksi produk gula aren. Kemudian untuk tingkat organisasi di Desa Jelok terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kelembagaan formal (adanya Surat Keputusan/SK) meliputi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu terdapat perkumpulan warga berupa dasawisma, pengajian rutin serta arisan. Terakhir, kapasitas jaringan asosiasi tercermin dalam kemampuan kolektivitas masyarakat untuk melaksanakan fungsi mereka responsif, efektif, dan efisien sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat dari aktor dan proses baik di dalam maupun di luar komunitas.

Ketiga, mengidentifikasi strategi adaptif masyarakat dalam upaya resiliensi ekonomi. Dalam hal ini penyintas memiliki kemampuan adaptif dalam merespon kondisi pascabencana melalui pemanfaatan peluang usaha baru seperti ternak lebah (klanceng) yang menghasilkan madu; inisiasi usaha baru cucian motor dan bank sampah yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memperoleh tambahan maupun memiliki kebutuhan layanan serta memanfaatkan relasi sosial berupa pertemanan dan hubungan kekerabatan untuk memperoleh dana pinjaman untuk memulai kembali usaha sebelum bencana terjadi

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis menyampaikan terimakasih kepada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan bagi tim penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Selain itu, tim juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pada kegiatan Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) VIII tahun 2019.

Referensi

- [1] Widyanta, AB. (2007). Kisah Kisruh di Tanah Gempa Catatan Penangan Bencana Gempa Bumi Yogja-Jateng 27 Mei 2006. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- [2] Benson, Charlotte dan John Twigg dengan Tiziana Rossetto. (2007). Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana: Catatan Panduan bagi Lembaga-Lembaga yang Bergerak dalam Bidang Pembangunan. ProVention Consortium Secretariat.
- [3] Comfort, L.K., Boin, Arje dan Demchak, Chris C. (2010). Designing Resilience: Preparation for Extremen Events. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- [4] Greiving, S., dan Ubaura, M. (2016). Spatial Planning and Following Disasters: International and Comparative Perspectives. Great Britain : Policy Press.
- [5] UNISDR. (2009). UNISDR Terminology on disaster. Geneva: UNISDR.
- [6] Walker, B., dan Salt, D. (2006). Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in Changing W. Washington DC: Island Press.
- [7] Tanner, T., Lewis, D., Wrathall, D., Bronen, R., Cradock-Henry, N., Huq, S., et al.. (2015). Livelihood resilience in the face of climate change. Nature Climate Change, 1, 23–26. <https://doi.org/10.1038/NCLIMATE2431>.
- [8] Chaskin, J. Robert. (1999). Defining Community Capacity: A Framework and Implications from a Comprehensive Community Initiative. The Chapin Hall Center for Children at the University of Chicago.
- [9] Creswell, John W. (2012). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [13] Doriza, Shinta. (2015). Ekonomi Keluarga. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [14] Dharmawan AH. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. Sodaliti Vol. 01, No. 02, Agustus 2007 hal. 169-192.
- [15] Scoones, Ian. (1998). Sustainable Rural Livelihoods a Framework for Analysis. IDS Working Paper 72. Brighton: IDS.
- [16] Wisner, B., P. Blaikie, T. Cannon dan I. Davis. (2004). At Risk: Natural Hazards People's Vulnerability and Disasters (2nd edition), New York: Routledge.
- [17] Comfort, L.K., Boin, Arje dan Demchak, Chris C. (2010). Designing Resilience: Preparation for Extremen Events. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- [18] Pramono, Rudy. (2016). Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI Vol 18, No 1 tahun 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v18i1.342>